

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak PBB menyatakan bahwa dasawarsa tahun 1960-an sebagai dasawarsa pembangunan maka banyak negara-negara setelah berakhir Perang Dunia II melaksanakan kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui kenaikan GNP terutama di negara-negara dunia ketiga. Tingkat GNP per kapita yang tinggi dianggap akan meneteskan kesejahteraan ke bawah atau akan mendistribusikan kemakmuran (*trickle-down effect*). Asumsinya bahwa GNP yang tinggi akan menambah tabungan dan investasi, dan penambahan investasi baru akan membutuhkan unit produksi baru. Oleh karena itu, akan membuka lapangan pekerjaan baru, memperoleh pendapatan, mengurangi pengangguran dan lain-lain. Namun dalam prosesnya, model pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang selama ini dilaksanakan memberikan dampak negatif yang begitu besar terhadap permasalahan sosial, seperti masalah kemiskinan, kesenjangan, kekerasan dan kerusakan lingkungan hidup (Jakti dan Ibramsjah, 1981, h. 7-8).

Adapun masalah pembangunan ekonomi di Indonesia, menurut Sritua Arief dan Adi Sasono yang dikutip Suwarsono dan Alvin Y. So (2006, h.122-125), proses pembangunan yang dilaksanakan sejak masa pemerintahan Orde Baru memberikan beberapa dampak dan menjadi *issue* aktual sampai saat ini, diantaranya bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia dibarengi pula dengan tingkat pengangguran tinggi serta semakin melebarnya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin (*the have and the have not*). Disamping itu kebijakan pembiayaan pembangunan yang diarahkan menuju tahap industrialisasi pada era Orde Baru dilakukan dengan memperbesar pinjaman luar negeri dan substitusi impor, data menunjukkan bahwa Orde Baru

Universitas Indonesia

menerima warisan sediaan utang luar negeri Orde Lama sebesar 10 juta \$ AS, dan setelah tiga puluh tahun lebih membangun Indonesia, Orde Baru meninggalkan sediaan utang sebesar 150 milyar \$ AS kepada orde pemerintahan berikutnya (Baswir dkk. 2000, h. 47), kondisi ini mengakibatkan adanya ketergantungan keuangan kepada pihak luar dan hal ini sangat beresiko bagi perekonomian suatu negara yang dalam sejarahnya di Indonesia mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997 karena masalah moneter dan keuangan ini.

Terkait dengan dampak pembangunan, pada masa pemerintahan saat ini pun masalah kemiskinan akibat pengangguran dan ketimpangan ekonomi masih tetap tinggi, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS, Maret 2007) bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada 2005 sebanyak 35,1 juta jiwa atau 15,97% dari total jumlah penduduk Indonesia dan mengalami peningkatan menjadi 39,3 juta jiwa (17,75%) pada 2006. lalu turun lagi menjadi 37,17 juta jiwa (16,58%) pada 2007. Di lain pihak upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing untuk mengurangi ketimpangan ekonomi telah banyak dikembangkan oleh pemerintah, suatu model pengembangan ekonomi rakyat yang dilakukan pertama kali dimotori oleh program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1994/1995, yaitu dengan memberikan bantuan dana bergulir, bantuan pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, dan bantuan pendampingan.

Berbagai program lain terutama pasca krisis ekonomi akibat pembangunan yang salah arah atau pembangunan terdistorsi ini, pemerintah semakin gencar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*) dan program pengentasan kemiskinan (*poverty allevation*), baik melalui jalur pembangunan sektoral maupun regional, seperti Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi atau disingkat PDM-DKE (Sumodiningrat, 1999, h. 209). Dari semua program

yang telah dijalankan itu bisa dikatakan model ini cukup berhasil - dalam pengertian dapat dikerjakan sesuai rencana - tetapi masalah yang ditanggulangi tidak kunjung berkurang bahkan kesenjangan ekonomi semakin melebar meskipun sejak awal pencanangan program, penerapan model pembangunan berbasis manusia (*people centered development*) mulai dilaksanakan, yaitu melalui upaya-upaya pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Semakin besarnya tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan belum menyentuh akar permasalahan sebenarnya sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan bisa dikatakan belum maksimal, hal ini disebabkan karena pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dipandang sebagai suatu program (Adi, 2002, h. 171), dimana pemberdayaan hanya dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yang biasanya ditentukan jangka waktunya, misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1, 2, ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal ini diperkuat Hasibuan (1997, h.57) yang berpendapat bahwa ada beberapa kelemahan pada berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini, diantaranya adalah proyek-proyek penanggulangan kemiskinan dibatasi oleh waktu yang harus selesai dalam jangka pendek sehingga merugikan program itu sendiri.

Sedangkan Sriharini (2007, h.116-118), mengatakan bahwa sebenarnya banyak program atau proyek pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, realitas kemiskinan yang diukur berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa program-program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan belum berhasil dengan baik. Diantara faktor penyebab kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia

menurutnya adalah: *pertama*, program penanggulangan kemiskinan cenderung terfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial (orientasi kedermawanan) untuk orang miskin, bukan untuk memberdayakan sehingga memperburuk moral, menimbulkan perilaku ketergantungan dan korupsi dalam penyalurannya. *Kedua*, kurangnya pemahaman tentang faktor penyebab kemiskinan tersebut.

Menurut Tjiptoherijanto dan Soemitro (1998, h. 247-250) program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil yang sudah menjadi strategi dan kebijaksanaan pemerintah sejak Repelita I, dimana pemberdayaan usaha kecil dilakukan dengan mengembangkan sistem keterkaitan (*linkages*) antar usaha (kecil-menengah-besar), antar wilayah dan antar sektor ekonomi. Namun upaya-upaya itu belum bisa mencapai sasaran yang diharapkan, hambatan yang dihadapi dari sistem *linkages* ini disebabkan tidak proaktifnya dari unit usaha menengah besar untuk bertanggungjawab dalam penyaluran atau pemasaran dan penggunaan produk usaha kecil tersebut, selain itu kesempatan usaha kecil rumah tangga akan berkembang bila masyarakat diberi kesempatan untuk mengorganisasikan diri dalam pembentukan kelompok usaha bersama (KUB), pembentukan sentra-sentra unit usaha kecil dan koperasi, pendirian percontohan usaha industri dan paket bantuan peningkatan keterampilan, bimbingan teknologi dan desain serta bantuan pemasaran dan pemberian informasi bisnis dapat berjalan dengan baik dan simultan.

Kurang maksimalnya program pemberdayaan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan bisa dilihat dari hasil studi penelitian yang dilakukan oleh Sujana (2003, h.175-200) tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Pengrajin Kelambu di Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, melalui Program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) berupa stimulan dana bergulir dan bantuan teknis, program ini merupakan kebijakan pemerintah di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

(Koperasi / PKM) yang ditujukan untuk mengurangi dampak akibat krisis ekonomi, walaupun program ini merupakan program yang menekankan pola “*bottom up planning*” berdasarkan pada konsep pemberdayaan yang mengutamakan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan (*people centered development*), hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah masih sangat dominan terutama pada tahap persiapan program, sedangkan pengrajin lebih banyak terlibat dalam tahap pelaksanaan, disamping itu program ini tidak mempunyai konsep yang jelas tentang kesinambungan program (*sustainable*) dan tidak mempunyai kerangka kebijakan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak.

Sedangkan penelitian Ichsan (2004, h.151-159), tentang program pemberdayaan masyarakat melalui Program Gema Assalam: Studi pada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Mukim Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, program yang berasal dari Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, hasil penelitian di lapangan menggambarkan bahwa walaupun program ini sudah menggunakan konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan program Gema Assalam di Mukim Biskang masih belum memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat miskin hal ini karena alokasi dana yang salah sasaran, dimana penggunaan dana yang sangat besar digunakan untuk kegiatan fisik yang tidak langsung menyentuh masyarakat miskin, salah satu penyebabnya adalah kurang adanya fungsi pengawasan yang optimal dan masih rendahnya keberadaan LSM.

Begitu juga pada perusahaan yang melakukan program pemberdayaan masyarakat atau lebih dikenal dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility – CSR*), menurut Nursahid (2006, h.165), yang melakukan penelitian di PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan

PT Telekomunikasi Indonesia, hasil penelitian pada ketiga perusahaan BUMN itu menunjukkan sebagian besar kegiatan masih bersifat karitas daripada filantropis, bantuan atau sumbangan masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat dan konsumtif, belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal yang mengarah pada penguatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) sehingga dapat mengentaskan persoalan masyarakat pada akar persoalan sesungguhnya. Dari penelitian ketiga perusahaan ini diketahui belum melakukan pemetaan sosial secara komprehensif sebagai jaminan bahwa penyusunan dan pelaksanaan programnya didasarkan pada *database* kondisi masyarakat yang benar dan akurat.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Saragih (1992, h. 97), tentang program penyaluran kredit baik melalui koperasi maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE), seperti KUD (Koperasi Unit Desa), BPR, Kupedes KIK (Kredit Investasi Kecil), KCK (Kredit Candak Kulak), Simpedes, Supra Insus, dan lain-lain. Program-program pemerintah ini pada umumnya mempunyai masalah yang sama, yaitu tidak mampu mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang mempunyai “bias kota” dan “bias lapisan atas”. Disamping itu menurutnya, hambatan yang dihadapi oleh usaha kecil adalah adanya pembinaan dan campur tangan pemerintah yang terlalu ketat, sehingga menyebabkan ketergantungan masyarakat miskin dan usaha kecil dan menengah ini kepada pemerintah.

Berkaitan dengan koperasi, keadaan umum terhadap organisasi lokal ini bisa dilihat dari Hasil penelitian Suharyono (1991, h.167) dengan topik Kemampuan Koperasi dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian yang dilakukan di Malang ini, diperoleh simpulan bahwa koperasi tidak berhasil dan belum mempunyai peranan dalam perekonomian nasional karena dipengaruhi banyak faktor, antara lain disebabkan oleh kelemahan

manajemen, sikap mental pengelola, pengawasan yang lemah, kurangnya permodalan, serta adanya hambatan lingkungan.

Disamping itu, menurut Suharyono kendala lain yang ditemui adalah adanya kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat oleh pimpinan menjadi salah satu kendala tidak berkembangnya koperasi. Masalah dalam menentukan kebijakan dasar koperasi tersebut disebabkan karena koperasi mempunyai tujuan yang berdimensi ganda (*dual identity*), yakni sebagai lembaga ekonomi dan sebagai lembaga yang memiliki watak sosial. Pemilihan kebijakan organisasi koperasi banyak tergantung pada persepsi pengelola tentang tujuan koperasi. Kemampuan koperasi banyak dipengaruhi oleh kebijakan dasar yang ditentukan oleh para pengambil kebijakan koperasi.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriansyah (2002, h.156) tentang Profil Pengrajin Tenun Adat Sambas dan Upaya Peningkatan Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Pengrajin, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa peran koperasi dalam memberdayakan pengrajin tenun belum maksimal, faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain: sumber daya manusia pengurus masih rendah, pendelegasian tugas antara ketua terhadap bawahan terlalu berlebihan, kurang keseriusan pengurus dalam mengelola koperasi. Sehingga berdampak pada pengrajin tenun, walaupun kegiatan bertenen di kabupaten sambas sudah berlangsung cukup lama, namun tidak menampakkan suatu kemajuan.

Padahal selama ini peranan koperasi dalam kerangka pembangunan banyak tercermin dalam pernyataan-pernyataan bahwa “koperasi adalah wadah perekonomian rakyat”, bahwa “koperasi adalah sarana pengembangan usaha lemah”, bahwa “koperasi adalah sarana pemerataan kesempatan usaha”, dan sebagainya. Pernyataan ini mencerminkan adanya peranan yang diharapkan dari koperasi supaya bisa berkembang dan maju dari keadaannya sekarang, yang umumnya masih lemah dan kecil peranannya, menuju kepada wadah

usaha yang benar-benar dapat memenuhi berbagai aspirasi yang diuraikan seperti di atas (Ismangil, 1994, h. 35).

Disisi lain, sebenarnya koperasi dapat dijadikan wadah perjuangan bagi pengembangan para pengusaha kecil, karena melalui koperasi ini para pelaku usaha ekonomi rakyat dimungkinkan dapat mengakses, kepada berbagai fasilitas dan sumber-sumber daya pengembangan yang tersedia, baik pada instansi-instansi pemerintah maupun badan-badan usaha milik negara dan swasta. Namun, corak koperasi yang ada di Indonesia adalah koperasi-koperasi dengan segala usaha sangat kecil, sehingga tidak mampu memperkuat kemampuan bersaing, karena tidak mampu mewujudkan *economic of scale* (Nasti, 2004, h. 41).

Oleh karena itu, perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah terhadap pengusaha kecil, seperti kepada UMKM supaya tidak terjadi kemiskinan dan kesenjangan. Mengenai pentingnya keberpihakan ini, menurut Adi Sasono dalam seminar Refleksi 23 tahun Pusat Peran serta Masyarakat (PPM) dengan tema “Ideologi Pemerataan sebagai Strategi untuk Menggerakkan Sektor Riil.” Pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan makro ekonomi dari mengandalkan pertumbuhan menjadi lebih mengutamakan pemerataan dan keadilan (*growth with equity*), pemerintah harus lebih bijaksana untuk menjadikan sektor UMKM sebagai target utama pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan APBN untuk kepentingan pemerataan dan selama pemerintah tidak melihat sektor UMKM sebagai sektor strategis, maka kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial akan makin lebar (Media Indonesia, Jumat, 8 Februari 2008/ no. 9883/ tahun XXXIX, h. 13).

Gambaran nyata tentang Peran strategis UMKM terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM mencapai 99,9 % dari total pelaku usaha dan mampu menyerap 77,6 juta tenaga kerja. UMKM terus tumbuh dari 43 juta unit usaha pada 2001 menjadi 48,9 juta unit usaha pada tahun 2007,

**Universitas Indonesia**



bahkan sektor UMKM menjadi katup penyelamat saat terjadi krisis ekonomi pada akhir 1997. Namun demikian, peran strategis UMKM masih saja dipandang sebelah mata dan terpinggirkan (Jurnal Berdaya, Vol. V, no. 8 Agustus 2007, h.19).

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan, selain pemerintah seperti disebutkan sebelumnya maka tidak kalah penting adanya keberadaan dan peranan organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Istilah LSM menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 yang dikutip Ismawan didefinisikan sebagai berikut:

“Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara suka rela kehendak sendiri dan berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya (Bambang Ismawan, 1992, h. 79-80).”

Banyak organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan kegiatan intinya melalui pemberdayaan masyarakat, adapun tujuan yang diharapkan dari program-program mereka antara lain untuk meningkatkan pendapatan, seperti pemberdayaan ekonomi melalui koperasi. Dengan adanya koperasi di tengah-tengah komunitas sasaran ini, diharapkan pemberdayaan ekonomi akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Seperti model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh suatu lembaga universitas di Universitas St. Francis Xavier Kanada. Penguatan kelembagaan melalui koperasi hasil dampingan universitas ini, mempunyai sejarah yang panjang tentang struktur perkoperasian di tengah-tengah masyarakat, yaitu sejak tahun 1920 sampai 1930-an, sehingga membuat masyarakat miskin

**Universitas Indonesia**

mempunyai tradisi berkoperasi yang kuat secara berkelanjutan – koperasi yang terletak di Cape Breton, Nova Scotia ini – mampu bertahan dan memperkuat solidaritas masyarakat ketika terjadi krisis ekonomi sekitar tahun 1930-an di negara tersebut. Hal ini karena pemberdayaan ekonomi yang dilakukan terhadap koperasi Cape Breton disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat (*local*) walaupun koperasi sendiri pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang berlaku umum (Ife, 1995, h. 143 – 144).

Sedangkan di Indonesia sendiri, salah satu lembaga yang menjalankan pemberdayaan masyarakat adalah Dompot Dhuafa Republika, yang sejak tahun 2000 menggulirkan program Masyarakat Mandiri dengan fokus kegiatannya untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Program Masyarakat Mandiri (MM) didedikasikan Dompot Dhuafa Republika untuk memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan yang menjangkau komunitas pedesaan, perkotaan, wilayah pasca bencana, serta komunitas berdasarkan klaster ekonomi. Dalam perkembangannya, program MM banyak melakukan upaya pemberdayaan ekonomi, seperti melalui koperasi dan Kelompok Simpan Pinjam (KSP). Pada tanggal 1 Juli 2005 program Masyarakat Mandiri berubah menjadi sebuah lembaga otonom dan menjadi salah satu jejaring Dompot Dhuafa Republika, dan sejak tahun 2007 Lembaga MM menempati kantor baru di daerah Parung Hijau Kecamatan Kemang-Kabupaten Bogor.

Sebagai lembaga yang mempunyai visi “menumbuhkan komunitas-komunitas yang berdaya dan berkemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara mandiri dan berkesinambungan”, maka program-program MM diarahkan dengan menggunakan pendekatan melalui tahap-tahap sebagai berikut: *pertama*, pembentukan kelompok secara partisipatif. *Kedua*, pendampingan langsung. *Ketiga*, penumbuhan kader lokal. *Keempat*, pengembangan komunitas lokal. *Kelima*, menjalin kerja sama lintas pelaku (*multistakeholder*). Dimana tujuan akhir yang ingin dicapai dari kelima jenis

pendekatan ini adalah bagaimana kader komunitas siap mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan program, keuangan, dan kelembagaan. Koperasi oleh MM sebagai organisasi lokal menjadi bagian tak terlepaskan dari program ini.

Dari beberapa tahapan intervensi sosial yang dilaksanakan oleh lembaga MM dalam menyiapkan pembentukan koperasi, tidak jarang implementasi di lapangan kadang-kadang mengalami kegagalan karena mengalami beberapa kendala atau hambatan. Seperti hasil penelitian Triana Kusuma Dewi, dengan topik Proses penyiapan koperasi pada komunitas sasaran program pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di dua desa sasaran ini, memiliki hasil yang tidak sama dan diperoleh fakta bahwa proses penyiapan pembentukan koperasi yang dilakukan oleh lembaga MM tidak mudah. Ada yang berhasil dan ada pula yang mengalami kegagalan, dalam arti bahwa pemberdayaan ekonomi itu tidak sampai terbentuk suatu koperasi, tetapi hanya sampai tahap pembentukan Kelompok Swadaya Mandiri (KSM).

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan penyiapan koperasi menurutnya adalah masyarakat bersifat terbuka, pengurus cukup amanah dan mampu bekerja keras, kesigapan tenaga pendamping (*community worker*) untuk mengganti peran kepada pengurus lokal koperasi serta adanya kedisiplinan kaum ibu dalam beribadah dan mentaati aturan. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah masalah kepengurusan pada masyarakat lokal, masalah friksi-friksi di masyarakat, masalah permodalan, masalah kemacetan dalam perguliran pembiayaan, masalah adanya dugaan penyelewengan, masalah kekurangsiapan tenaga pendamping, serta lokasi koperasi dari komunitas sasaran yang jauh dari pusat kota.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga MM, meskipun tidak mudah dalam proses penyiapan pembentukan koperasi tetapi ada juga koperasi yang berhasil terbentuk dari proses dampingan lembaga ini. Sebagai gambaran

berikut ini adalah koperasi yang terbentuk dari hasil dampingan lembaga MM pada program pemberdayaan ekonomi sejak program digulirkan tahun 2000 sampai dengan 2007:

**Tabel 1.1**  
**Koperasi Hasil Dampingan MM**  
**2005 - 2007**

| No | Nama Koperasi                 | Lokasi              | Usaha Anggota                          | Tahun berdiri |
|----|-------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 1  | KSU Buana jaya                | Kabupaten Bogor     | Simpan Pinjam                          | 2006          |
| 2  | KSU Muara                     | Kabupaten Tangerang | Nelayan                                | 2006          |
| 3  | KSU Mitra Bersama Iwul        | Kabupaten Bogor     | Perajin Tahu                           | 2007          |
| 4  | Koperasi ISM Petik            | Kabupaten Tangerang | Peternak Itik                          | 2007          |
| 5  | Koperasi Syariah Ummi         | Cianjur             | Pengumpul Produk Perajin Rajutan       | 2007          |
| 6  | KSU Pasir Jaya                | Kotamadya Bogor     | Pedagang (Sayuran, Mie Ayam, Bakso)    | 2007          |
| 7  | KSU Manggarsari               | Pacitan             | Perajin Gula Kelapa                    | 2007          |
| 8  | Koperasi Syariah Agri Mandiri | Cianjur             | Pertanian                              | 2007          |
| 9  | KSU LPP Tangerang             | Tangerang           | Penyokong Posyandu Usaha Simpan Pinjam | 2007          |

Sumber: Masyarakat Mandiri

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi seperti yang menjadi program MM selama ini. Lembaga MM mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan penguatan lembaga lokal khususnya koperasi - ditengah banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaannya - koperasi hasil dampingan MM masih tetap *survive* untuk melestarikan dan mengembangkan koperasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang keberlanjutan kegiatan koperasi ini di Lembaga MM.

Dari beberapa koperasi hasil dampingan lembaga MM, yang menarik untuk diteliti khususnya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Buana Jaya dan Mitra

**Universitas Indonesia**

Bersama Iwul, keduanya berlokasi di Kabupaten Bogor. KSU Buana Jaya yang berdiri tahun 2006 ini, sebagian besar dikelola oleh kaum perempuan yang anggotanya mayoritas bermata pencaharian dengan usaha warung langsung, gula aren, dan kelontongan. Kinerja dan capaian koperasi bisa dilihat dari koperasi ini yang menduduki ranking I se-Kecamatan Tanjung sari. Prestasi lainnya KSU Buana jaya telah berhasil mengakses lembaga keuangan syariah melalui kerja sama permodalan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sedangkan KSU Mitra Bersama Iwul berdiri tahun 2007, meskipun baru berdiri, koperasi ini mampu menunjukkan pengelolaan yang baik, dimana dalam pengadministrasian, koperasi ini telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Koperasi yang beranggotakan 25 orang ini - sebagian besar anggotanya adalah perajin usaha tahu - telah berhasil memperluas usahanya melalui usaha pembiayaan, penjualan kacang kedelai, penjualan kayu bakar dan obat-obatan. Anggota layanannya kini telah meluas ke perajin keset dan pedagang kecil di pasar sampai keluar desa dengan total mitra layanan berjumlah 200 orang.

## **1.2 Permasalahan**

Masyarakat Mandiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan komunitas di pedesaan, perkotaan, serta di komunitas wilayah asal pekerja migran. Kelahirannya dibidani oleh Dompot Dhuafa Republika dan sejak bulan Juli 2005, MM resmi menjadi lembaga otonom dengan memperkuat visi dan misi sebagai wahana pemberdayaan berbagai komunitas dhuafa atau tak berdaya (*powerless*) untuk mencapai kemandirian. Proses pemberdayaan komunitas bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat guna meningkatkan taraf hidupnya, dengan cara mengoptimalkan sebaik mungkin sumber daya alam dan manusia setempat.

Begitu pentingnya proses berkelanjutan ini bagi MM, dapat dilihat pada misi dan tujuan yang diembannya, yaitu untuk memfasilitasi komunitas dalam membangun diri dan lingkungannya ke arah kehidupan yang lebih berkualitas dalam sistem mata pencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood system*) melalui kelembagaan lokal berkelanjutan, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pada proses penyiapan pembentukan koperasi bagi Lembaga MM tidak mudah, ada yang berjalan lancar dan ada pula yang mengalami kegagalan.

Begitu juga setelah tahap terminasi, untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan koperasi dalam pengelolaannya terdapat perbedaan, ada yang dikelola dengan baik dan ada pula yang mengalami kesulitan terhadap hambatan yang dihadapinya. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan sejauhmana perbedaan dan persamaan dari keberlanjutan kegiatan koperasi hasil dampingan Lembaga MM, khususnya di KSU Buana jaya dan KSU Mitra Bersama Iwul, yang dirumuskan dalam pertanyaan :

1. Bagaimana perbandingan antara KSU ISM Mitra Bersama Iwul dan KSU Buana jaya untuk keberlanjutan kegiatan koperasi?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat antara KSU ISM Mitra Bersama Iwul dan KSU Buana jaya untuk keberlanjutan kegiatan koperasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan perbandingan antara KSU ISM Mitra Bersama Iwul dan KSU Buana jaya untuk keberlanjutan kegiatan koperasi;

2. Menggambarkan faktor pendukung dan penghambat antara KSU ISM Mitra Bersama Iwul dan KSU Buana jaya untuk keberlanjutan kegiatan koperasi.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Manfaat atau signifikansi yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, untuk menambah khazanah sudut pandang tentang pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan bagaimana mewujudkan keberlanjutan kegiatannya supaya programnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (*sustainable*);
2. Sedangkan secara praktis, ditujukan khususnya kepada pengambil kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan umumnya kepada pemerhati program pemberdayaan ekonomi untuk memberikan gambaran secara kongkrit hasil penelitian tentang pemberdayaan ekonomi melalui koperasi sehingga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan tentang koperasi yang berkelanjutan;
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan bagi koperasi yang bersangkutan dan Lembaga MM sebagai LSM yang melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat golongan kecil. Sehingga pihak koperasi maupun lembaga dapat mempertimbangkan kemungkinan perbaikan yang menyangkut keberlanjutan dari kegiatan dan program yang dijelankannya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Punch (1998, h. 4) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang sebagian besar data-datanya bukan berbentuk angka-angka, dimana data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan memfokuskan diri pada contoh-contoh yang lebih kecil tetapi detail dan mendalam. Pendekatan ini untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik.

Adapun pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antar gejala seperti adanya lembaga masyarakat mandiri, pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, pengelolaan koperasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan koperasi dan lain-lain, dimana semua gejala pergejala berusaha dideskripsikan dan dikaji secara menyeluruh hubungan antar gejala itu dalam bentuk kata-kata dan bahasa melalui metode ilmiah.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan yang dilakukan dan untuk menggambarkan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan koperasi setelah masa dampingan berakhir (terminasi) pada program pemberdayaan ekonomi Lembaga MM, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Neuman (2000, h. 21-22) penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci tentang fenomena sosial dari suatu kondisi, pola dan hubungan sosial, untuk kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori yang ada.



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara menyeluruh suatu variabel atau situasi dalam suatu hubungan (*interrelationship studies*), seperti menjelaskan Lembaga Masyarakat Mandiri, membandingkan perbedaan dan persamaan dalam pengelolaan koperasi, dan membandingkan faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat yang dihadapi koperasi di dua koperasi yang menjadi dampingan Lembaga MM. Dari pendeskripsian ini diharapkan diperoleh gambaran secara lengkap tentang pengelolaan koperasi untuk keberlanjutan kegiatannya dari koperasi komunitas hasil dampingan Lembaga MM.

### **1.5.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.3.1 Lokasi Penelitian**

Dari sekian banyak koperasi hasil dampingan Lembaga MM seperti pada tabel 01, menurut informasi awal yang diperoleh penulis dari pengurus MM menyatakan bahwa dalam mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan koperasi setelah dilepas atau setelah tahap terminasi pengelolaannya terdapat perbedaan, ada yang berjalan dengan baik dan ada pula yang tidak. Penulis tertarik meneliti masalah keberlanjutan koperasi ini, untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan hasil dampingan, apakah karena adanya faktor pengurus koperasi, kesiapan masyarakat, atau ada faktor lainnya.

Untuk mengetahui hal itu, penulis mencoba mengambil dua sampel koperasi yang mempunyai tingkat kinerja relatif berbeda dengan harapan supaya ada data pembandingan sebagai tolak ukur (*benchmark*). Berdasarkan kriteria tertentu – dari informasi awal diperoleh keterangan bahwa terdapat perbedaan kinerja diantara koperasi yang lama dan koperasi yang baru berdiri – melihat pertimbangan itu, maka lokasi penelitian ini dilakukan di KSU Buanajaya Kecamatan Tanjung sari dan KSU Mitra Bersama Iwul Kecamatan Parung, kedua koperasi ini terletak di Kabupaten Bogor.

**Universitas Indonesia**

KSU Buanajaya menjadi salah satu tempat penelitian karena koperasi ini termasuk salah satu koperasi pertama dari hasil dampingan lembaga MM yang berdiri pada tahun 2006, dimana program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pada komunitas sasaran ini sudah dimulai sejak tahun 2000. Disamping itu, alasan lain koperasi ini dijadikan lokasi penelitian karena bila dilihat dari kinerjanya maka koperasi ini cukup menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan tingkat kemacetan pengembalian berada di bawah 5%, koperasi yang dikenal dengan koperasi para perempuan ini menduduki tingkat I di kecamatan.

Sedangkan KSU Mitra Bersama Iwul dipilih karena cukup representatif untuk dijadikan sebagai pembanding karena koperasi ini relatif mempunyai perbedaan dalam pengelolaannya, meskipun koperasi ini baru berdiri pada 2007 namun sudah mampu menunjukkan pengelolaan yang baik, dimana dalam pengadministrasian, koperasi ini sudah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan koperasi sehari-hari.

Disamping itu, KSU Mitra Bersama Iwul mempunyai “keunikan” tersendiri dibandingkan dengan beberapa lembaga mitra MM, dimana di tengah-tengah komunitas masyarakat golongan kecil ini - oleh MM komunitas ini dinamakan dengan Kampung Hayati, terinspirasi oleh konsep *bio-village* dengan *zero waste*-nya - masyarakatnya bermata pencaharian yang bergerak dalam usaha pengolahan tahu, sehingga dapat dijadikan contoh ideal sebagai studi kasus (*case studies*) masalah pemberdayaan ekonomi seperti yang menjadi program Lembaga MM selama ini.

#### 1.5.3.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian, waktu pelaksanaan untuk kegiatan penelitian direncanakan mulai Januari sampai Juni 2008, melalui tahap-tahap penyusunan penelitian, pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer, dan analisis data serta penulisan laporan penelitian.

**Universitas Indonesia**

#### 1.5.4 Pemilihan informan

Informan adalah orang-dalam pada latar penelitian yang bermanfaat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diseleksi dengan sengaja oleh peneliti karena sampel ini dianggap memiliki pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, teknik *purposive sampling* ini tidak melihat apakah sampel yang dipilih mewakili populasi yang ada, tetapi lebih menekankan pada pemilihan informan yang mempunyai pengetahuan yang luas, tujuannya supaya informasi yang diperoleh dapat digali lebih dalam (Neuman, 2000, h. 198). Oleh karena itu, yang dijadikan informan pada penelitian ini adalah :

1. Pengurus dan Pengelola Koperasi sebanyak 8 orang
2. Petugas Pendamping dari Lembaga MM sebanyak 2 orang
3. Ketua Kelompok Koperasi sebanyak 4 orang
4. Tokoh Formal dan Tokoh Masyarakat sebanyak 5 orang
5. Anggota Koperasi sebagai Pengguna Jasa Koperasi sebanyak 6 orang

Untuk melihat lebih jauh tentang *theoretical sampling* informan terhadap informasi yang ingin diperoleh, berikut disajikan tabel 2.1 tentang penetapan informan berdasarkan informasi yang ingin diperoleh seperti berikut ini:

Tabel 2.1

**Penetapan Informan Berdasarkan Informasi yang Ingin Diperoleh  
di KSU Buana Jaya dan KSU Mitra Bersama Iwul**

| No | Informasi yang Ingin Diperoleh  | Informan   |
|----|---|--|
| 1  | Pengelolaan koperasi untuk mengetahui keberlanjutan kegiatan koperasi, deskripsi pengelolaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keanggotaan koperasi</li> <li>- Manajemen koperasi</li> <li>- Permodalan koperasi dan SHU Koperasi</li> <li>- Pengembangan usaha, efek koperasi, dan peranan pemerintah terhadap koperasi,</li> </ul> | Pengurus Koperasi  |
| 2. | Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan koperasi, meliputi:  |  |
|    | a. Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan pada proses terbentuknya KSU Buana Jaya dan KMB Iwul   | Petugas Pendamping MM  |
|    | b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada pengelolaan koperasi di desa Buana Jaya dan Desa Bojong Sempu   | Petugas Pendamping MM dan Pengurus Koperasi                        |
|    | c. Deskripsi mengenai keanggotaan, prosedur, manfaat, kendala dan harapan dengan adanya koperasi  | Ketua Kelompok dan anggota koperasi sebagai pengguna jasa koperasi |
| d. | Deskripsi mengenai manfaat dan respon terhadap keberadaan koperasi di desa Buana Jaya dan Desa Bojong Sempu terhadap masyarakat pengguna jasa koperasi  | Tokoh Formal dan Tokoh Informal                                    |

### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang selalu berpedoman dan mengacu pada tujuan penelitian. Ada pun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kajian Dokumentasi dan Kepustakaan

Tujuannya untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan untuk mengkonfirmasi dan mendukung data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Kajian ini dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis yang terkait dengan keseluruhan pembahasan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dokumentasi, data statistik maupun laporan media massa;

## 2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dengan wawancara dapat digali hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Menurut Black dan Champion (1976, h. 354) "*the interview is an act of verbal communication for the purpose of eliciting information. Beyond this universally recognized feature, wide range of view on the essentials of interviews can be found*". (Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Disamping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang diperlukan berkenaan dengan semua aspek masalah penelitian;

## 3. Observasi (*Observation*)

Teknik pengumpulan data ini tujuannya untuk mendapatkan informasi, dengan cara melihat perilaku dalam keadaan (*setting*) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada (Black dan Champion, 1976, h. 329). Oleh karena itu, aktivitas penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mendengarkan, mencatat atau merekam selalu mengacu pada tujuan penelitian, yang berhubungan dengan kegiatan koperasi hasil dampingan Lembaga MM.

### 1.5.6 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Suprayogo dan Tobroni (2001, h.191) tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat tahapan itu merupakan satu kesatuan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 'analisis'. Adapun penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Analisis data selama pengumpulan data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis. Kegiatan analisis data dapat meliputi: pertama, menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah; dua, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul; tiga, pembuatan rencana pengumpulan data sebelumnya; empat, pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya; dan lima, penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, dokumen) berikutnya;

2. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul,antisipasi adanya reduksi sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Reduksi data/ proses transformasi

ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun;

### 3. Penyajian data

Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data, Miles dan Huberman yang dikutip Suprayogo dan Tobroni (2001, h. 194), mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;

### 4. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan mengumpulkan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompotensi akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis. Tetapi kesimpulan telah disediakan. Mula-mula belum jelas kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan 'final' mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, mencakup : latar belakang masalah, permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab II : Tinjauan pustaka, mencakup teori dan konsep serta penjelasan sebagai alat analisis dan untuk memperkuat penelitian;

Bab III : Gambaran umum Lembaga Masyarakat Mandiri dan Koperasi yang menjadi Obyek Penelitian;

Bab IV : Hasil temuan lapangan, memaparkan hasil penelitian tentang data dan informasi yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara, pada bagian ini juga dilakukan ringkasan (*review*) dan kajian terhadap data, dokumentasi, informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian;

Bab V : Analisis hasil temuan lapangan, menganalisis hasil temuan penelitian yang ada di bab empat dengan cara membandingkan dengan konsep-konsep yang menjadi pijakan penelitian;

Bab VI : Kesimpulan dan saran, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian;

Bagian akhir tesis ini akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran